

ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Sleman

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi



Disusun oleh :

Debby Maria Longdong

NIM : 992114179

NIRM : 990051121303120179

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA



2004

SKRIPSI
**ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH**
Studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Sleman

Diajukan oleh :

Nama : Debby Maria Longdong

NIM : 992114179

NIRM : 990051121303120179

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Tanggal : 18 - Mei - 2004



(Fr. Reni Retno A., SE., M.Si., Akt)

Pembimbing II

Tanggal : 28 - Mei - 2004



(Firma Sulistiyowati, SE., M.Si)

SKRIPSI

**ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH**

Studi kasus pada pemerintah Kabupaten Sleman

Dipersiapkan dan ditulis oleh :

Nama: Debby Maria Longdong

NIM : 992114179

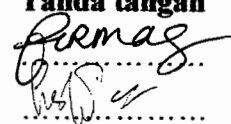
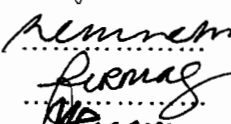
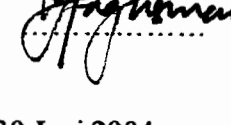
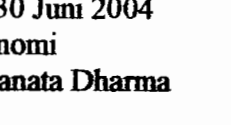

NIRN: 990051121303120179

Telah dipertahankan di depan panitia penguji

Pada tanggal 21 Juni 2004

Dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

	Nama Lengkap	Tanda tangan
Ketua	: Firma Sulistiyowati, SE, M.Si	
Sekretaris	: Lisia Apriani, SE, M.Si, Akt	
Anggota	: Fr. Reni Retno A., SE, M.Si, Akt	
Anggota	: Firma Sulistiyowati, SE, M.Si	
Anggota	: Dra. YF. Gien Agustinawansari, MM., Akt	

Yogyakarta, 30 Juni 2004

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma

Dekan



Drs. Alex Kahu Lantum, M.S

MOTTO dan PERSEMBAHAN

“Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya,..”

(Matius 21:22)

*“Si Tou Timou Tumou Tou”
(Manusia Hidup untuk Memanusiakan Manusia)
^DR. Sam Ratulangi^*

*“Hidup itu bagaikan naik sepeda...
kau tidak akan jatuh kecuali berhenti mengayuh”
*Claude Pepper**

Skripsi ini kusembahkan untuk;

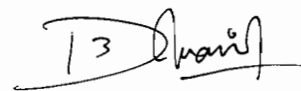
Bunda Maria,
Mama & Papa Tercinta

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, Juni – 2004

Penulis

A handwritten signature in black ink, featuring a stylized 'D' and 'L' with the number '13' written inside the 'D'.

Debby Maria Longdong

ABSTRAK

ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Sleman

**Debby Maria Longdong
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta 2004**

Penelitian ini bertujuan : 1) Untuk mengetahui perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman dari tahun anggaran 1997/1998 – 2002, apakah mampu atau tidak mendukung pelaksanaan otonomi daerah, 2) Untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Sleman. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah Angka Indeks Kuantita untuk menunjukkan perubahan kuantita dari satu periode ke periode yang lain dan Analisis Kemampuan Keuangan Daerah untuk menghitung besarnya persentase Pendapatan Asli Daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman dari tahun anggaran 1997/1998 – 2002 mengalami kenaikan sampai 129% dan mengalami penurunan sampai 4% dari tahun dasar sebesar 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman diharapkan mampu untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, 2) Besarnya persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah dari tahun anggaran 1997/1998 – 2002 rata-rata sebesar 12,74% per tahun sehingga pola hubungan dan tingkat kemampuan keuangan daerah adalah instruktif. Hal ini berarti kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sleman belum mampu melaksanakan otonomi daerah. Selain itu besarnya persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengeluaran Rutin hanya mencapai rata-rata sebesar 21,65% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah belum mampu untuk membiayai pengeluaran rutin daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.

ABSTRACT

THE ANALYSIS OF REGIONAL FINANCIAL ABILITY IN THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL AUTONOMY A Case Study on Sleman Regency Government

**Debby Maria Longdong
Sanata Dharma University
Yogyakarta 2004**

This research aimed at: 1) understanding the development of Regional Original Revenue of Sleman Regency since 1997/1998 to 2002 budget year, whether it was able or not to support the regional autonomy implementation, 2) understanding regional financial ability of Sleman Regency in the implementation of regional autonomy.

The type of this research was a case study on Sleman Regency Government. Data collection techniques used was Quantity Index Value to show the quantity change of one period to another and the Analysis of Regional Financial Ability to measure the percentage of Regional Original Revenue.

The result of this research showed that 1) The Development of Regional Original Revenue of Sleman Regency since 1997/1998 to 2002 underwent an increase up to 129% and underwent a decrease down to 4% from the basic year as many as 100%. This condition showed that Regional Original Revenue of Sleman Regency was expected to be able to support the implementation of regional autonomy, 2) On the average, the percentage of Regional Original Revenue to the Total Regional Revenue since 1997/1998 to 2002 was 12.74% per year so that the pattern of relationship and the regional financial ability level was instructive. This mean that the regional financial ability of Sleman Regency was not able to carry out the regional autonomy. In addition, the percentage of Regional Original Revenue to the Routine Expense just reached, on the average, as much as 21.65% per year. This showed that Regional Original Revenue was unable to finance the regional routine expense of Sleman Regency Government.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Penyusunan skripsi berjudul **“Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, studi kasus pada pemerintah Kabupaten Sleman”**, ini adalah bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Program Studi Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dorongan dan kerjasama dari berbagai pihak maka skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih pada :

1. Yesus Kristus, atas berkat, terang Roh Kudus dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Santaku, Bunda Maria, karena selalu merangkul, mendampingi, memberi harapan dan yang selalu mendengar dan mengabulkan doa dan permohonan penulis lewat Doa Novena Tiga Salam Maria.
3. Bapak Drs. Alex Kahulantum, M.S, selaku Dekan Fakultas Ekonomi.
4. Bapak Drs. YP. Supardiyono, M.Si, Akt., selaku Pembantu Dekan I yang telah memberikan izin penelitian untuk penulisan skripsi ini.

5. Ibu Fr. Reni Retno A., SE, M.Si, Akt., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan masukan, kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Firma Sulistiyowati, SE, M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan perhatian agar penulis selalu termotivasi untuk cepat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Nugroho, BA, selaku Kepala Bidang Litbang dan Evaluasi yang telah mengatasnamakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman serta para pegawai sekretariat BAPPEDA.
8. Bapak Sudarmadi, SST selaku kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman.
9. Ibu Dra. Nogati Sri Karyati, M.S, selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman.
10. Ibu Dra. Hj. Peni Winarningsih, M.Si, selaku Kepala Sub Bidang Anggaran Kabupaten Sleman yang sudah membantu penulis mendapatkan data-data yang diperlukan.
11. Mas Ibnu dan semua pegawai di Sub Bidang Anggaran yang telah banyak memberikan bantuan berupa masukan, saran dan penjelasan tentang data-data yang penulis butuhkan.
12. Mama dan papa tercinta, yang selalu dengan tulus mendukung, membimbing, berkorban terlebih yang telah membekali hidup sehingga penulis bisa menjadi seperti sekarang ini (*aku bangga menjadi anakmu, ma... pa...*) dan yang tidak henti-hentinya berdoa untuk kesuksesan dan kebahagiaan penulis. (*semoga aku bisa menjadi anak sesuai harapan mama dan papa*).

13. Kak Ipe Riberu, atas motivasi, pengertian dan kesabaran yang membuat penulis selalu berusaha untuk menjadi yang ‘terbaik’. *So, thanks for everything.*
14. Tatty Ehok, ST, MM dan Olivia Duarte, SE., untuk semangat, dorongan saat penulis putus asa dan bantuan-bantuannya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, *thanks* juga atas masukan dan kritiknya (pelan sih, tapi dalam...!), dan yang sudah menjadi ‘kakak’ selama penulis di Yogya.
15. Kakak-kakakku (K’Desy dan keluarga, K’Handry, K’Nelly dan keluarga) serta keponakan-keponakanku, atas dukungan dan bantuannya.
16. Keluarga besarku; Oma Yulin dan Alm. Opa Alo, Opa Sang dan Alma. Oma Ondo, Ma’Cika dan keluarga, Ma’Ena dan keluarga, Tante Tance dan keluarga, Om Paul dan keluarga, Tante Leni dan keluarga, atas doa dan harapan serta sepupuku Meyta, Gita ‘tomboy’, Sita dan Ade Novita, dll, yang selalu membuat penulis tersenyum dan kangen pulang Manado.
17. Frater Tarsy, Suster-suster Karmel di Manado, Suster-suster FMM di Yogya, atas doa-doanya selama ini.
18. Teman-teman Akt’99 kelas C, kelas MPT, KKP VII dan X’ Sambar 55 khususnya Ina, Lenda, Hantu, Elvi, Prita, Ema, Boncel, Tutut, Noven, N’dang, Nona, Nita, Netty (Mdn), Desy, dll,.
19. Teman-temanku ; No Tan, Mas Alvin, Mas Ampi, Mas Beny, Om Ito, Pa’Jef, Pa’Lotris, K’Erwin, K’Joice, K’Yono, K’Stanis, Mas Romi, Diana atas bantuan dan dukungannya.

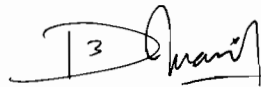
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh sebab itu dengan lapang hati berbagai saran dan kritik untuk perbaikan penulisan skripsi ini akan penulis terima.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang belum disebutkan di atas.

Semoga skripsi ini berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Terima kasih dan ***PAKATU'AN WO PAKALAWIREN.***

Yogyakarta, Juni 2004

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Debby Maria Longdong', with a stylized flourish at the end.

Debby Maria Longdong

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	3
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Otonomi Daerah	7



B. Pengertian Otonomi Daerah	8
C. Prinsip-prinsip Pemberian Otonomi Daerah	9
D. Prinsip Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	12
E. Sumber-sumber Pendapatan Daerah	12
1. Pendapatan Asli Daerah	13
2. Dana Perimbangan	15
3. Pinjaman Daerah	15
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	15
F. Keuangan Daerah	15
G. Review Penelitian Sebelumnya	19
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	21
B. Tempat dan Waktu Penelitian	21
C. Subyek dan Obyek Penelitian	21
D. Teknik Pengumpulan Data	22
E. Teknik Analisis Data	22
BAB IV. GAMBARAN UMUM KABUPATEN SLEMAN	
A. Keadaan Geografis	27
B. Keadaan Penduduk	28
C. Sosial	30
D. Industri	33
E. Keuangan dan Perbankan	34

BAB V. ANALISIS DATA dan PEMBAHASAN

A. Analisis Data	35
1. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah	36
2. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah	39
a. Persentase PAD dengan Total Pendapatan Daerah	41
b. Persentase PAD dan Bagi Hasil dengan Total Pendapatan Daerah	41
c. Persentase PAD dengan Pengeluaran Rutin	43
d. Persentase PAD dan Bagi Hasil dengan Pengeluaran Rutin	43
B. Pembahasan	47
1. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah T.A 1997/1998 – 2002	47
2. Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sleman	49
a. Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah	49
b. PAD dan Bagi Hasil terhadap Total Pendapatan Daerah	51
c. PAD terhadap Pengeluaran Rutin	51
d. PAD dan Bagi Hasil terhadap Pengeluaran Rutin	52

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	54
B. Keterbatasan Penelitian	55
C. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1	Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah 18
3.1	Realisasi dan Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Dengan Angka Indeks 23
4.1	Letak Geografis dan Batas Wilayah Kabupaten Sleman 28
5.1	Data Realisasi PAD T.A 1997/1998 – 2002 37
5.2	Data Pendapatan Asli Daerah 40
5.3	Perbandingan PAD terhadap Total Pendapatan Daerah 41
5.4	Perbandingan PAD dan Bagi Hasil terhadap Total Pendapatan Daerah 42
5.5	Persentase PAD terhadap Pengeluaran Rutin 43
5.6	Persentase PAD dan bagi Hasil terhadap Pengeluaran Rutin..... 44
5.7	Realisasi dan Perkembangan PAD dengan Angka Indeks T.A 1997/1998 – 2002 47
5.8	Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sleman 49

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1 Banyaknya penduduk Kabupaten Sleman tahun 1998 – 2002.....	30
4.2 Banyaknya perusahaan industri besar, sedang, kecil dan Rumah tangga di Kabupaten Sleman tahun 2002.....	33
4.3 Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman Tahun anggaran 2002.....	34

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tuntutan reformasi di segala bidang yang didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam menyikapi berbagai permasalahan daerah akhir-akhir ini membawa dampak terhadap keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pembangunan daerah dirasakan telah mendorong dan meningkatkan stabilitas, pemerataan, pertumbuhan, dan pengembangan daerah serta kesejahteraan masyarakat. Selaras dengan hal tersebut, MPR sebagai wakil-wakil rakyat menjawab tuntutan masyarakat dengan menghasilkan beberapa ketetapan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah. Salah satu ketetapan yang dimaksud adalah Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Berdasarkan ketetapan MPR tersebut pemerintah telah mengeluarkan satu paket kebijakan tentang otonomi daerah yaitu Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Otonomi yang luas serta perimbangan keuangan yang lebih adil, proporsional dan transparan antar tingkat pemerintahan menjadi salah satu tuntutan daerah dan masyarakat.

Ditetapkannya Undang-Undang tentang Otonomi daerah ini dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat menggali sendiri sumber-sumber

daya yang tersedia sebagai modal pembiayaan yang akan digunakan dalam pembangunan daerah. Konsekuensi dari pelaksanaan kedua Undang-Undang tersebut adalah bahwa daerah harus mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggungjawab.

Selain itu, pembangunan otonomi daerah (Widjadja,1998:124) ditujukan juga untuk :

- a. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.
- b. Dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Pembangunan kestabilan politik dan dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa (pembauran).

Di sisi lain, saat ini kemampuan keuangan beberapa Pemerintah Daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari Penerimaan Pusat. Oleh karena itu bersamaan dengan semakin sulitnya keuangan negara dan pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri, maka setiap daerah dituntut harus dapat membiayai diri melalui sumber-sumber keuangan yang dikuasainya. Peranan Pemerintah Daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah.

Selanjutnya berkaitan dengan hakekat otonomi daerah yaitu yang berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik, dan pengaturan kegiatan dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data keuangan daerah yang memberikan gambaran statistik perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran, dan analisa terhadapnya merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan melihat kemampuan atau tingkat kemandirian daerah.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **"ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH"**.

B. Batasan Masalah

Kemampuan suatu daerah untuk berotonomi dapat diketahui dengan melihat tolok ukur dan indikator yang ada. Tolok ukur ini adalah merupakan factor-faktor pokok, penunjang dan khusus (Widjaja, 2001:39) seperti berikut:

1. Faktor Pokok yang terdiri dari:
 - a. Kemampuan PAD/Keuangan
 - b. Kemampuan Aparatur
 - c. Kemampuan Partisipasi Masyarakat

- d. Kemampuan Ekonomi
 - e. Kemampuan Demografi
 - f. Kemampuan Organisasi dan Administrasi
2. Faktor Penunjang yang terdiri dari:
- a. Faktor Geografi
 - b. Faktor Sosial Budaya
3. Faktor Khusus yang terdiri dari:
- a. Sosial Politik
 - b. Hankam
 - c. Penghayatan Keagamaan

Karena banyaknya faktor yang mempengaruhi kemampuan untuk berotonomi sehingga dalam penelitian ini, penulis membatasi permasalahan pada Kemampuan PAD/Keuangan Daerah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman dari tahun 1997/1998 – 2002?
2. Apakah keuangan Kabupaten Sleman mampu dalam upaya pelaksanaan otonomi daerah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman dari tahun 1997/1998 – 2002, apakah mampu atau tidak mendukung pelaksanaan otonomi daerah
2. Untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sleman dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Daerah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang kemampuan daerah dalam menghadapi otonomi daerah.
2. Bagi Universitas
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi kepustakaan.
3. Bagi Penulis
Mendapatkan kesempatan untuk menerapkan teori yang diperoleh selama kuliah ke dalam praktek sesungguhnya.

F. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori-teori dari hasil studi pustaka yang dapat dijadikan dasar untuk mengolah data-data tentang “kemampuan keuangan daerah dalam menghadapi otonomi daerah”.

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subyek dan obyek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV. GAMBARAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

Bab ini menjelaskan tentang keadaan geografis, keadaan penduduk, sosial, dan industri serta keuangan dan perbankan Kabupaten Sleman.

BAB V. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan analisis data serta pembahasannya.

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang ada dan saran penulis yang diharapkan dapat berguna bagi semua pihak.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Otonomi Daerah

Dalam pelaksanaan pemantapan otonomi daerah melalui upaya pembangunan yang dilaksanakan masyarakat, perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Penyertaan masyarakat sejak awal dalam persiapan, pelaksanaan dan pemeliharaan, karena mereka yang melaksanakan, memanfaatkan, menikmati, dan memelihara sehingga dapat berkelanjutan.
2. Setiap program harus dapat meningkatkan keterampilan masyarakat, menambah pendapatan dan meningkatkan mutu kehidupan masyarakat.
3. Pendampingan bagi program-program pemberdayaan masyarakat perlu memiliki dan menerapkan prinsip kepedulian dan pemahaman mengenai misi untuk membantu masyarakat termasuk melatihnya dan mempersiapkannya.
4. Aparat daerah diharapkan dapat lebih siap di dalam proses penyiapan masyarakat lokal.
5. Pembangunan bagi desa tertinggal dan yang terpuruk akibat dampak krisis tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dengan misi, tujuan, dan pendekatan lintas sektor dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

B. Pengertian Otonomi Daerah

Menurut UU nomor 22 tahun 1999, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Daerah Otonom yang dimaksud adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yaitu otonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa, dan peran serta aktif masyarakat serta peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu secara luas, nyata, dan bertanggungjawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat, dan campur tangan daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal.

Menurut Wayang yang dikutip Syafrudin (1984:4), mengatakan bahwa otonomi daerah adalah kebebasan untuk memelihara dan menjalankan kepentingan khusus sdaerah, dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri, dan berpemerintahan sendiri. Sedangkan Syafrudin sendiri berpendapat bahwa istilah otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan yang terbatas atas

kemandirian adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi yang dimaksud dengan otonomi daerah pada pokoknya selalu melihat otonomi itu sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Prinsip-prinsip Pemberian Otonomi Daerah

Untuk mencapai tujuan otonomi daerah, maka diperlukan prinsip-prinsip dalam pemberian otonomi daerah, antara lain, pelaksanaan otonomi harus didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai prinsip otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, yaitu:

1. Otonomi luas berarti keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan di bidang politik, luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan moneter dan fiskal, agama serta kewenangan di bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
2. Nyata berarti keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah.
3. Otonomi yang bertanggung jawab adalah perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam

mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Akan tetapi pencapaian tujuan tersebut tergantung dari kesiapan masing-masing daerah yang menyangkut ketersediaan sumber daya atau potensi daerah, terutama adalah sumber daya manusia yang tentunya akan berperan dan berfungsi sebagai motor penggerak jalannya pemerintah daerah. (Halim, 2001:24)

Sedangkan prinsip-prinsip pemberian Otonomi Daerah yang dijadikan pedoman dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah:

1. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah.
2. Pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.
3. Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedang Otonomi Daerah Provinsi merupakan otonomi yang terbatas.
4. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar-Daerah.

5. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom, dan karenanya dalam Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tidak ada lagi Wilayah Administrasi. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh Pemerintah atau pihak lain, seperti badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata, dan semacamnya berlaku ketentuan Peraturan Daerah Otonom.
6. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislative Daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atau penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
7. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada Daerah Provinsi dalam kedudukannya sebagai Wilayah Administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
8. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari Pemerintah kepada Daerah, tetapi juga dari Pemerintah dan Daerah kepada Desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.

D. Prinsip Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Otonomi daerah tidak dapat dipisahkan dengan desentralisasi dan dekonsentrasi. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, ada tiga prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah. **Pertama**, digunakan asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan. **Kedua**, penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di daerah kabupaten dan daerah kota. Dan **ketiga**, asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di daerah propinsi, daerah kabupaten, daerah kota dan daerah desa. **Asas desentralisasi** adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. **Asas dekonsentrasi** adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah. Sedangkan asas **tugas pembantuan** adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber-sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.

E. Sumber-sumber Penerimaan Daerah

Penyelenggaraan tugas Pemerintah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah juga merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi). (Widjaja, 2001:42)

Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

a. Hasil Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 menjadi landasan hukum bagi daerah untuk memungut apa yang disebut pajak daerah. Pajak daerah sendiri merupakan pembayaran iuran oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah ini terdiri dari:

1) Pajak Daerah untuk Daerah Tingkat I

Terbagi atas:

a). Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.

- b). Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan kendaraan di atas air.
- c). Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (BBKB).
- d). Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

2) Pajak Daerah untuk Daerah Tingkat II

Terbagi atas:

- a). Pajak hotel dan restoran.
- b). Pajak penerangan jalan.
- c). Pajak reklame.
- d). Pajak hiburan.
- e). Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C.

b. Hasil Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah daerah dimana kita dapat melihat secara langsung adanya hubungan antara balas jasa yang diterima karena adanya pembayaran retribusi tersebut. Jenis pelayanan yang dapat dikenakan pungutan retribusi digolongkan dalam tiga jenis pelayanan yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perijinan tertentu.

- c. Hasil perusahaan milik daerah dan penghasilan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

2. Dana Perimbangan

Terdiri atas :

- a. Dana Bagi Hasil, yaitu Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan penerimaan dari sumber daya alam, yaitu penerimaan negara yang berasal dari pengelolaan sumber daya alam antara lain di bidang pertambangan umum, pertambangan minyak dan gas bumi, kehutanan dan perikanan.
- b. Dana Alokasi Umum
- c. Dana Alokasi Khusus

3. Pinjaman Daerah

4. Lain-lain Penerimaan Daerah yang sah. Lain-lain penerimaan daerah yang sah antara lain hibah atau penerimaan dari daerah Propinsi atau Daerah Kabupaten/Kota lainnya, dan penerimaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

F. Keuangan Daerah

Keuangan daerah mempunyai arti yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan kegiatan pembangunan oleh pelayanan kemasyarakatan di daerah, oleh karena itu keuangan daerah diupayakan untuk berjalan secara berdayaguna dan berhasilguna.

Keuangan daerah adalah kemampuan daerah untuk mengelola, mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan

mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk RAPBN (Supriatna, 1998:174). Sedangkan menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam perimbangan keuangan pusat dan daerah ada dua asas yang menjadi landasan, yaitu asas motivasi dan asas efisiensi. Asas motivasi, artinya hal-hal yang berkaitan langsung dengan fungsi pelayanan primer diberikan kepada daerah. Sedangkan asas efisiensi, artinya masyarakat di daerah secara langsung dapat merasakan manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat atas pengalokasian sumber daya ekonomi daerah setempat. Adapun sumber-sumber dana perimbangan meliputi: hasil eksploitasi sumber daya alam, bagi hasil pajak, pajak tambahan, fasilitas pajak dan pinjaman daerah. Selama ini perhitungan perimbangan keuangan pusat dan daerah ditetapkan berdasarkan empat variabel: Penduduk, (jumlah, komposisi, umur, tingkat pendidikan), wilayah (luas, panjang jalan, panjang jembatan, sungai, pulau), ekonomi (PDRB, tingkat inflasi, tingkat pengangguran) dan PAD (hasil pajak, retribusi daerah, perusahaan daerah, dan hasil-hasil sah lainnya). Variabel ini digunakan untuk memformulasikan

masalah penerimaan keuangan daerah dalam hubungannya dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah dari segi teori perencanaan secara umum (Adirinekso, 1999:123-124).

Menurut Halim, pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, walaupun pengukuran kemampuan keuangan daerah ini akan menimbulkan perbedaan. Ada empat macam pola hubungan yang memperkenalkan “hubungan situasional” yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Halim, 2001:168-169) antara lain:

1. Pola Hubungan Instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
2. Pola Hubungan Konsultatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu, melaksanakan otonomi.
3. Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.

4. Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Bertolak dari teori tersebut, untuk melihat pola hubungan daerah dengan kemampuan daerah dilihat dari sisi keuangan, dapat dikemukakan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1

Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Halim, 2001:169

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antara propinsi dan kabupaten/kota yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintah daerah. Dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintahan menjadi kewenangan daerah. Sehingga untuk melihat kemampuan keuangan daerah dalam menjalankan otonomi

daerah, salah satunya bisa diukur melalui kinerja/kemampuan keuangan daerah. Menurut Halim (2001:27) kemampuan keuangan daerah dapat dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Persentase PAD terhadap Total Penerimaan Daerah
2. Persentase PAD + Bagi Hasil terhadap Total Penerimaan Daerah
3. Persentase PAD terhadap Pengeluaran Rutin
4. Persentase PAD + Bagi Hasil terhadap Pengeluaran Rutin

G. Review Penelitian Sebelumnya

Abdul Halim (2001) melakukan penelitian tentang Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Menghadapi Otonomi Daerah, Studi Kasus di Kabupaten Malang. Abdul Halim mengemukakan bahwa kesiapan pemerintah Kabupaten Malang dari segi kemampuan keuangan daerah masih sangat kurang. Untuk itu perlu diupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi.

Made Wahyu Dhyana (2002) meneliti Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kotamadya Salatiga. Dikemukakannya bahwa tingkat kemampuan keuangan daerah Kotamadya Salatiga belum cukup kuat untuk mendukung otonomi daerah. Hal itu disebabkan di beberapa parameter yang digunakan dalam mengukur kemampuan keuangan daerah Kotamadya Salatiga belum bisa terpenuhi.

Maria Magdalena Sribejani (2001) melakukan penelitian tentang Peranan Pendapatan Daerah Asli Daerah Terhadap APBD Tahun 1996-2000

di Kabupaten Sleman. Dari penelitian ini, penulis mengemukakan bahwa dengan melihat perkembangan PAD, maka pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Sleman masih mengandalkan sumber pembiayaan dari luar. Dan untuk prediksi PAD dan APBD Kabupaten Sleman sampai dengan tahun 2010 menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap APBD belum memungkinkan untuk pelaksanaan otonomi daerah secara mandiri.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah studi kasus.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman.

2. Waktu penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Oktober-Desember tahun 2003.

C. Subyek dan Obyek Penelitian

1. Subyek penelitian

a) Bappeda Kabupaten Sleman

b) BPKKD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah)
Kabupaten Sleman

c) BPS Kabupaten Sleman

2. Obyek penelitian

Yang menjadi obyek penelitian adalah Pendapatan Asli Daerah dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Pemerintah Kabupaten Sleman.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara menyalin data-data keuangan yang ada.

E. Teknik Analisis Data

Untuk menjawab permasalahan pertama digunakan Angka Indeks. Angka Indeks diartikan sebagai angka perbandingan yang perubahan relatifnya dinyatakan dalam bentuk prosentase terhadap yang lain. Pada dasarnya angka indeks ada 3 macam yaitu angka indeks harga, angka indeks kuantita dan angka indeks nilai.

Dalam penelitian ini digunakan angka indeks kuantita. Angka Indeks Kuantita menunjukkan perubahan kuantita dari satu periode ke periode yang lain. Angka Indeks Kuantita dinyatakan dengan rumus (Boedijoewono, 1999:161) yaitu :

$$Q_{o,n} = \frac{\sum Q_n}{\sum Q_o} \times 100\%$$

dimana;

$Q_{o,n}$ = Angka Indeks Kuantita tahun n dengan tahun dasar 0

\sum = Jumlah

Q_o = Kuantita tahun dasar

Q_n = Kuantita tahun yang akan dihitung angka indeks nya.

Untuk lebih jelas dapat digambarkan dengan menggunakan tabel berikut:

Tabel 3.1
Contoh Tabel Realisasi dan Perkembangan PAD dengan Angka Indeks
T.A 1997/1998 SD 2002

Tahun Anggaran	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah	
	Realisasi	Kenaikan/Penurunan (%)
1997/1998		
1998/1999		
1999/2000		
2000		
2001		
2002		

Jika hasil dari perhitungan Angka Indeks ini diketahui bahwa dari tahun ke tahun perkembangan PAD mengalami kenaikan, maka daerah tersebut dinyatakan mampu mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Untuk menjawab permasalahan kedua digunakan Analisis Kemampuan Keuangan Daerah, yaitu dengan membandingkan parameter-parameter berikut:

1. Persentase PAD terhadap TPD

Jika dari perhitungan ini diketahui bahwa:

- 1). Tingkat Kemandirian PAD terhadap TPD antara 0% - 25% berarti kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sleman rendah sekali, maka Kabupaten Sleman sangat tergantung kepada pemerintah pusat yang berarti tidak mampu melaksanakan otonomi daerah.
- 2). Tingkat Kemandirian PAD terhadap TPD antara 25% - 50% berarti kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sleman rendah, namun campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang dengan demikian dianggap sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah.
- 3). Apabila tingkat kemandirian PAD terhadap TPD antara 50% - 75% berarti kemampuan keuangan daerah tersebut sedang, dengan demikian daerah yang bersangkutan mendekati mampu melaksanakan urusan daerah.
- 4). Apabila tingkat kemandirian PAD terhadap TPD antara 75% - 100% berarti kemampuan keuangan daerah tersebut tinggi, maka campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.

2. Persentase PAD + Bagi Hasil terhadap TPD

Selain menghitung persentase PAD terhadap TPD, Bagi Hasil juga diharapkan dapat membantu meningkatkan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

3. Persentase PAD terhadap PR

Menurut Abdul Halim, kebijakan anggaran pada dasarnya selalu diusahakan agar pendapatan rutin daerah terutama yang bersumber dari PAD dapat membiayai pengeluaran rutin daerah. (Halim, 2001:323). Sehingga hasil dari perhitungan ini, diharapkan PAD dapat membiayai PR Kabupaten Sleman.

4. Persentase PAD + Bagi Hasil terhadap PR

Bagi hasil dalam perhitungan ini diharapkan mampu meningkatkan PAD dalam membiayai PR, sehingga Kabupaten Sleman dinyatakan mampu dalam membiayai segala urusan daerahnya.

Keterangan:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

TPD = Total Penerimaan Daerah

PR = Pengeluaran Rutin

Setelah menghitung parameter-parameter diatas, langkah selanjutnya menghitung tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Dengan rumus:

$$= \frac{\text{Sumbangan dan Bantuan}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$



Jika dari perhitungan ini diketahui bahwa sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat hasilnya kecil, maka tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap Pemerintah Pusat semakin rendah.

BAB IV

GAMBARAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

A. Keadaan Geografis

Kabupaten Sleman terletak di antara $107^{\circ} 15' 03''$ dan $100^{\circ} 29' 30''$ Bujur Timur, $7^{\circ} 34' 51''$ dan $7^{\circ} 47' 03''$ Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Sleman berketinggian antara 100 – 2500 meter dari permukaan air laut. Jarak terjauh Utara – Selatan kira-kira 32 km, Timur-Barat kira-kira 35 km.

Luas wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.48 Ha atau $574,8 \text{ Km}^2$ atau sekitar 18% dari luas propinsi D.I.Yogyakarta, yaitu $3.185,8 \text{ Km}^2$. Secara administratif terdiri dari 3 wilayah pembantu bupati, 17 wilayah kecamatan, 86 desa seta 1212 dusun (RW sebanyak 2866 buah dan RT sebanyak 6990 buah).

Wilayah di bagian selatan merupakan dataran rendah yang subur, sedang bagian utara sebagian besar merupakan tanah kering yang berupa ladang dan pekarangan, serta memiliki permukaan yang agak miring ke selatan dengan batas paling utara adalah Gunung Merapi. Di lereng selatan Gunung Merapi terdapat dua bukit, yaitu bukit Bukit Turgo dan Bukit Plawangan yang merupakan bagian dari Kawasan Wisata Kaliurang. Beberapa sungai yang mengalir melalui Kabupaten Sleman menuju Pantai selatan antara lain Sungai Progo, Krasak, Sempor, Nyoho, Kuning dan Boyong. Sedangkan untuk batas wilayah Kabupaten Sleman, selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4
Letak Geografis dan Batas Wilayah Kabupaten Sleman

Sebelah	Letak Geografis	Batas Wilayah
(1)	(2)	(3)
1. Barat	$107^{\circ} 15' 03''$ BT	Kabupaten Kulonprogo, Propinsi D.I. Yogyakarta. Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah.
2. Timur	$100^{\circ} 29' 30''$ BT	Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah.
3. Utara	$7^{\circ} 34' 51''$ LS	Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah.
4. Selatan	$7^{\circ} 47' 03''$ LS	Kabupaten Bantul, Propinsi D.I. Yogyakarta. Kota Yogyakarta, Propinsi D.I. Yogyakarta.

Sumber : BPS Kab. Sleman

B. Keadaan Penduduk

Berdasarkan hasil registrasi penduduk pada akhir tahun 2002, jumlah penduduk Sleman tercatat sebanyak 874.795 jiwa, terdiri dari 432.895 laki-

laki dan 441.900 perempuan. Dengan luas wilayah 874,8 km², maka kepadatan penduduk Kabupaten Sleman adalah 1.522 jiwa per km². Beberapa kecamatan yang relatif padat penduduknya adalah Depok dengan 3.192 jiwa per km². Mlati dengan 2.437 jiwa per km² serta Gamping dan Godean dengan masing-masing 2.374 jiwa dan 2.182 jiwa per km².

1. Tenaga Kerja

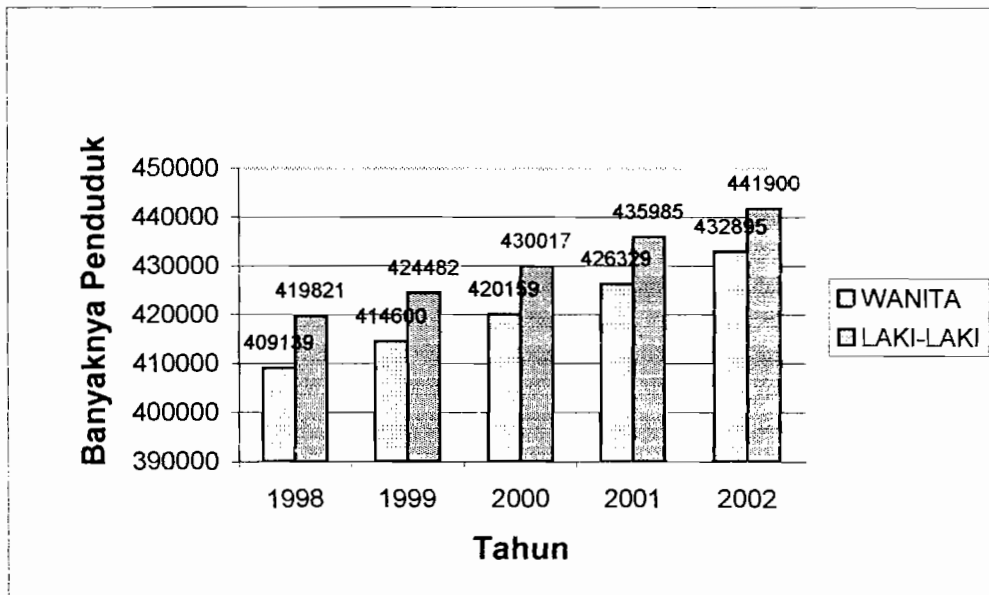
Banyaknya pencari kerja yang mendaftar pada Depnaker Kabupaten Sleman pada tahun 2002 tercatat sebanyak 14.201 orang. Sebagian besar dari mereka yakni sebanyak 8.639 orang (60,83%) berpendidikan SLTA atau sederajat, disusul oleh lulusan S1 sebanyak 3.657 orang (25,75%). Pencari kerja yang berpendidikan SD dan SLTP masing-masing tercatat 76 (0,54%) dan 678 orang (4,77%). Dari 14.201 pencari kerja, sebanyak 4.277 orang atau 30,12% (termasuk pendaftar tahun sebelumnya) telah ditempatkan bekerja yang tersebar pada berbagai sektor.

2. Keluarga Berencana

Sebagai upaya untuk mengendalikan banyaknya penduduk, Pemerintah melancarkan program KB. Program ini di samping untuk menekan ledakan jumlah penduduk, juga dimaksudkan sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Banyaknya pasangan usia subur (PUS) yang merupakan salah satu sasaran program KB pada tahun 2002 tercatat sebanyak 130.409 pasangan. Mereka tersebar pada 17 kecamatan dengan jumlah tersebar di Kecamatan Depok sebanyak 14.131 (10,84%) pasangan, disusul kecamatan Gamping

11.828 (9,07%) pasangan. Jumlah peserta KB aktif di Kabupaten Sleman pada tahun 2002 tercatat sebanyak 102.379 pasangan. Sebagian besar mereka lebih menyukai atau memilih alat KB berupa IUD (spiral) yakni sebanyak 39.142 orang (38,23%), kemudian KB suntik sebanyak 35.372 orang (34,55%). Sedangkan alat KB yang relatif kecil penggunaannya adalah Medis Operasi Pria (MOP).



Gambar 4.1 Banyaknya Penduduk Kabupaten Sleman Tahun 1998 - 2002

C. Sosial

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek terpenting dalam pengembangan sumber daya manusia. Kemajuan suatu bangsa banyak ditentukan oleh kualitas pendidikan penduduknya. Beberapa faktor utama yang mendukung

penyelenggaraan pendidikan adalah ketersediaan sekolah yang memadai dengan sarana prasarananya, pengajar dan keterlibatan anak didik, maupun Komite Sekolah.

Pada jenjang SD, Kabupaten Sleman pada tahun 2002/2003 memiliki sebanyak 519 unit sekolah yang terdiri dari 419 SD negeri dan 100 SD swasta dengan jumlah kelas masing-masing sebanyak 2.733 kelas untuk SD negeri dan 663 kelas untuk SD swasta. Banyaknya guru SD yang terlibat mencapai 3.846 orang di SD negeri dan 1.045 orang di SD swasta.

Pada jenjang SLTP, jumlah sekolah tercatat sebanyak 105 sekolah, yang terdiri dari 54 SLTP negeri dan 51 SLTP swasta, dengan menyediakan kelas masing-masing sebanyak 687 kelas untuk SLTP negeri dan 234 kelas untuk SLTP swasta. Jumlah guru yang mengajar di SLTP tercatat sebanyak 2.833 orang. Sebagian besar dari mereka yakni sekitar 1.965 orang mengajar di SLTP negeri dan selebihnya di SLTP swasta.

Untuk jenjang yang lebih tinggi, yakni SMU, tersedia sebanyak 49 sekolah dengan 17 SMU negeri dan 32 SMU swasta. Dengan mengamati jumlah institusi, terlihat bahwa peran swasta di Kabupaten Sleman dalam penyelenggaraan SMU lebih besar dibanding peran pemerintah. Demikian pula untuk jumlah kelas dan jumlah guru. Jumlah kelas yang dimiliki oleh SMU negeri sebanyak 212 unit dengan 653 guru dan SMU swasta sebanyak 214 unit dengan 833 guru swasta. Jumlah peserta didik

untuk SMU negeri sebanyak 2718 siswa, sedangkan swasta sebanyak 5771 siswa.

Untuk jenjang pendidikan menengah lainnya yakni SMK, terdapat sebanyak 47 sekolah yang didominasi oleh SMK swasta yakni sebanyak 40 sekolah. Banyaknya guru swasta yang terlibat juga lebih besar, yaitu sekitar 1257 orang dan sebanyak 532 orang mengajar di SMK negeri.

2. Agama

Komposisi penduduk menurut agama yang dipeluk di Kabupaten Sleman pada tahun 2002 mencatat sekitar 788.665 orang beragama Islam, Katolik sebanyak 54.543 orang, disusul oleh agama Kristen sebanyak 20.569 orang. Adapun penduduk yang beragama Hindu dan Budha masing-masing tercatat sebanyak 1.094 orang dan 701 orang.

3. Pariwisata

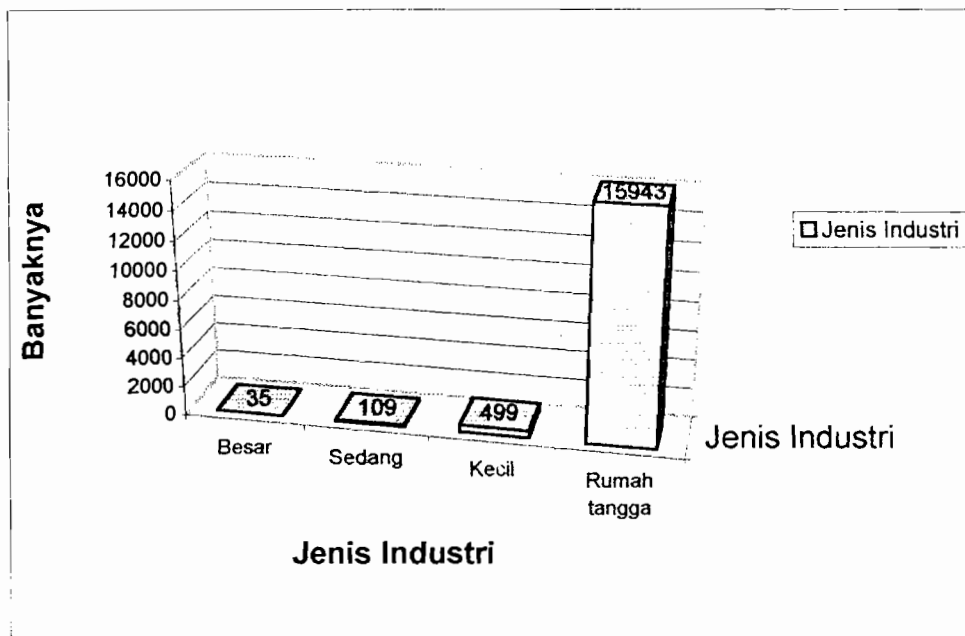
Aktivitas pariwisata di Kabupaten Sleman digerakkan oleh wisata museum, wisata candi, alam serta kegiatan kesenian pentas. Lima museum yang tersebar di kabupaten Sleman mampu menyedot pengunjung sebanyak 802.217 orang pada tahun 2002. Dari kunjungan tersebut diperoleh pendapatan dari karcis masuk sekitar Rp 836,23 juta.

Wisata candi, Kabupaten Sleman mampu menarik wisatawan 1.023.436 orang yang terdiri dari 935.975 orang wisatawan nusantara dan 87.461 orang wisatawan mancanegara. Aktivitas wisata yang mempertunjukkan seni pentas pada tahun 2002 menggelar 237 pertunjukkan yang ditonton oleh 323.318 pengunjung. Dari hasil

pertunjukkan tersebut diperoleh pendapatan dari karcis masuk sekitar Rp 26,747 juta.

D. Industri

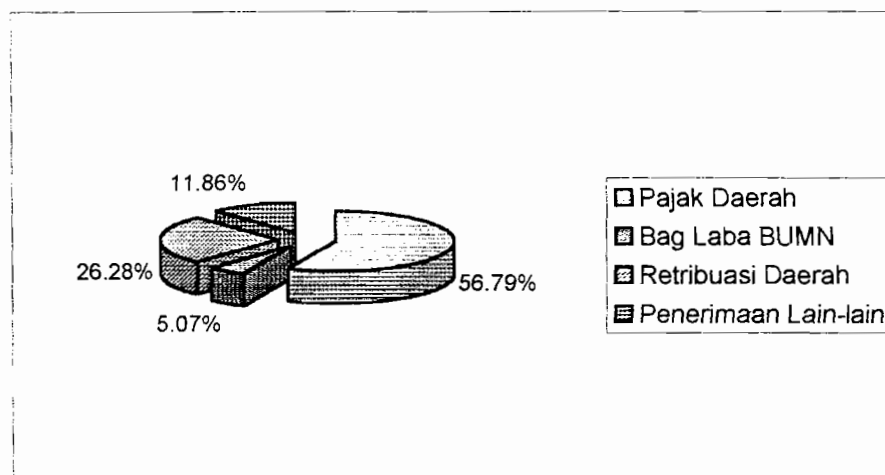
Industri dikelompokkan ke dalam empat sektor yaitu sektor industri rumah tangga, sektor industri kecil, sektor industri sedang dan sektor industri besar. Banyaknya industri besar sedang (IBS) di Kabupaten Sleman 153 perusahaan, Kecamatan Depok merupakan kecamatan yang mempunyai kontribusi terbesar yaitu sebanyak 37 perusahaan. Sementara jika dilihat dari perusahaan yang menyerap tenaga kerja terbesar adalah Kecamatan Sleman yaitu 5.080 tenaga kerja atau 26,73 persen terhadap total tenaga kerja yang diserap IBS di Kabupaten Sleman.



Gambar 4.2 Banyaknya Perusahaan Industri Besar, Sedang, Kecil dan Rumah Tangga di Kabupaten Sleman Tahun 2002

E. Keuangan dan Perbankan

Realisasi penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman tahun anggaran 2002 mencapai 383,09 milyar rupiah atau naik sebesar 24,17 persen dibanding tahun anggaran 2001 dengan bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 38,91 milyar rupiah. Besarnya pengeluaran tahun 2001 mencapai 293,23 milyar rupiah dengan pos pengeluaran terbesar untuk belanja pegawai sebesar 215,92 milyar rupiah. Sedangkan di tahun anggaran 2002 belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman mencapai 338,09 milyar dengan alokasi belanja pegawai mencapai 271,47 milyar rupiah atau 80,29 persen dari total belanja Pemerintah Daerah. Realisasi PAD terbesar berasal dari pajak daerah yang besarnya tercatat 29,57 milyar rupiah pada tahun anggaran 2001 dan 38,91 milyar rupiah pada tahun anggaran 2002.



Gambar 4.3 Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2002

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data

Pembangunan daerah ditujukan untuk meningkatkan kinerja daerah sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan pembangunan daerah, pemerintah daerah dituntut untuk dapat menggali sumber-sumber penerimaan daerah karena faktor keuangan daerah merupakan faktor terpenting dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Berdasarkan kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah maka kontribusi terbesar bagi pemerintah daerah Kabupaten Sleman saat ini adalah penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk mengetahui kemampuan otonomi suatu daerah ditinjau dari variabel keuangan daerah dapat diketahui dengan melihat perkembangan PAD setiap tahunnya dan melakukan analisis terhadap kemampuan keuangan daerah dengan harapan data tersebut mampu memberi gambaran yang terjadi selama periode penelitian. Dalam hal ini periode yang diteliti adalah dari tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 2002. Selama tahun anggaran tersebut terjadi perubahan periode tahun anggaran yaitu pada tahun anggaran 2000. Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta realisasinya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dimulai pada tanggal 1 April 2000 sampai dengan 31 Desember 2000 atau selama 9 bulan.

Sedangkan 3 bulan sebelumnya yaitu 1 Januari 2000 sampai dengan 31 Maret 2000 dimasukkan ke dalam tahun anggaran 1999/2000. Tahun anggaran 2001 dimulai pada tanggal 1 Januari sampai 31 Desember.

1. Perkembangan PAD

Untuk mengetahui perkembangan PAD Kabupaten Sleman selama enam tahun anggaran digunakan rumus:

$$Q_{o,n} = \frac{\sum Q_n}{\sum Q_o} \times 100\%$$

dimana:

$Q_{o,n}$ = Angka Indeks Kuantita tahun n dengan tahun dasar 0

\sum = Jumlah

Q_o = Kuantita tahun dasar

Q_n = Kuantita tahun yang akan dihitung angka indeks nya

Tabel 5.1 menunjukkan realisasi PAD sebagai dasar perhitungan perkembangan PAD dengan tahun dasar 1997/1998.

Tabel 5.1
Data Realisasi PAD
T.A 1997/1998 SD 2002
(dalam rupiah)

Tahun Anggaran	Realisasi PAD
1997/1998	14.825.140.000,00
1998/1999	14.414.507.991,00
1999/2000	14.293.975.695,51
2000	15.301.765.951,00
2001	24.414.489.693,36
2002	34.001.261.931,95

Sumber data: BPKKD Kabupaten Sleman

Tahun Anggaran 1997/1998, sebagai tahun dasar = **100%**

Tahun Anggaran 1998/1999 :

$$Q_{o,n} = \frac{\sum Q_n}{\sum Q_o} \times 100\%$$

$$= \frac{14.414.507.991,00}{14.825.140.000,00} \times 100\%$$

$$= 97,23\%$$

$$= \mathbf{97\% \text{ (dibulatkan)}}$$

Tahun Anggaran 1999/2000

$$Q_{o,n} = \frac{\sum Q_n}{\sum Q_o} \times 100\%$$

$$= \frac{14.293.975.695,51}{14.825.140.000,00} \times 100\%$$

$$= 96,42\%$$

$$= \mathbf{96\% (dibulatkan)}$$

Tahun Anggaran 2000 :

$$Q_{o,n} = \frac{\sum Q_n}{\sum Q_o} \times 100\%$$

$$= \frac{15.301.765.951,00}{14.825.140.000,00} \times 100\%$$

$$= 103,21\%$$

$$= \mathbf{103\% (dibulatkan)}$$

Tahun Anggaran 2001:

$$Q_{o,n} = \frac{\sum Q_n}{\sum Q_o} \times 100\%$$

$$= \frac{24.414.489.693,36}{14.825.140.000,00} \times 100\%$$

$$= 164,68\%$$

$$= \mathbf{165\% (dibulatkan)}$$

Tahun Anggaran 2002 :

$$Q_{o,n} = \frac{\sum Q_n}{\sum Q_o} \times 100\%$$

$$= \frac{34.001.261.931,95}{14.825.140.000,00} \times 100\%$$

$$= 229,35\%$$

$$= \mathbf{229\% (dibulatkan)}$$

2. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sleman dalam melaksanakan otonomi daerah dapat diketahui dengan membandingkan antara PAD dengan APBD dan beberapa parameter untuk menilai variabel keuangan daerah. Alasan mengapa PAD sebagai pusat perhatian dalam hal ini, karena PAD merupakan sumber yang aman dan sudah pasti akan diterima untuk membiayai semua pengeluaran dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Tabel 5.2
 Data Pendapatan Asli Daerah
 T.A 1997/1998 sd 2002

Sumber	Tahun Anggaran					
	1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000	2001	2002
Pajak Daerah	7.124.600.000,00	7.667.861.469,50	7.439.300.000,00	7.279.301.908,00	12.964.540.068,36	17.074.636.138,95
Retribusi Daerah	3.843.690.000,00	3.407.050.940,00	5.201.501.800,00	5.426.980.300,00	7.364.446.500,00	9.433.952.700,00
Bagian Laba BUMD	673.000.000,00	880.999.000,00	873.122.161,51	1.262.000.000,00	1.262.000.000,00	1.761.360.635,00
Penerimaan Dinas	2.577.850.000,00	2.036.323.581,50	-	-	-	-
Penerimaan Lain-lain	606.000.000,00	422.273.000,00	780.051.734,00	1.333.483.743,00	2.823.503.125,00	5.721.312.458,00
JUMLAH	14.825.140.000,00	14.414.507.991,00	14.293.975.695,51	15.301.765.951,00	24.414.489.693,36	34.001.261.931,95

Sumber : BPKKD Kabupaten Sleman

a. Persentase PAD dengan Total Penerimaan Daerah

Tabel 5.3
Perbandingan PAD terhadap Total Penerimaan Daerah
T.A 1997/1998 sd 2002
(dalam rupiah)

Tahun Anggaran (a)	PAD (b)	Penerimaan Daerah (c)	Perbandingan (%) (d = b / c)
1997/1998	14.825.140.000,00	85.569.920.023,22	17,32
1998/1999	14.414.507.991,00	99.956.556.169,47	14,42
1999/2000	14.293.975.695,51	124.767.303.215,51	11,46
2000	15.301.765.951,00	118.622.699.321,50	12,90
2001	24.414.489.693,36	245.452.502.493,36	9,95
2002	34.001.261.931,95	327.995.652.040,95	10,37

Sumber : BPKKD Kabupaten Sleman (data diolah)

b. Persentase PAD + Bagi Hasil dengan Total Penerimaan Daerah

Tabel 5.4
Perbandingan PAD dan Bagi Hasil dengan Total Penerimaan Daerah
T.A 1997/1998 sd 2002

Tahun Anggaran (a)	PAD (b)	Bagi Hasil (c)	Total PAD + Bagi Hasil (d = b + c)	Penerimaan Daerah (e)	% (d / e)
1997/1998	14.825.140.000,00	7.484.278.727,66	22.309.418.727,66	85.569.920.023,22	26,07
1998/1999	14.414.507.991,00	6.077.353.615,00	20.491.861.606,00	99.956.556.169,47	20,50
1999/2000	14.293.975.695,51	6.479.937.520,00	20.773.913.215,51	124.767.303.215,51	16,65
2000	15.301.765.951,00	6.356.167.333,00	21.657.933.284,00	118.622.699.321,50	18,26
2001	24.414.489.693,36	10.858.012.800,00	35.272.502.493,36	245.452.502.493,36	14,37
2002	34.001.261.931,95	21.184.390.109,00	55.185.652.040,95	327.995.652.040,95	16,82

Sumber : BPKKD Kabupaten Sleman (data diolah)

c. Persentase PAD dengan Pengeluaran Rutin

Tabel 5.5
Perbandingan PAD terhadap Pengeluaran Rutin
T.A 1997/1998 sd 2002
(dalam rupiah)

Tahun Anggaran (a)	PAD (b)	Pengeluaran Rutin (c)	Perbandingan (%) (d = b / c)
1997/1998	14.825.140.000,00	57.160.378.983,22	25,94
1998/1999	14.414.507.991,00	71.262.178.684,47	20,23
1999/2000	14.293.975.695,51	100.771.152.215,50	14,18
2000	15.301.765.951,00	92.088.674.071,50	16,62
2001	24.414.489.693,36	204.623.284.493,36	11,93
2002	34.001.261.931,95	82.889.470.337,78	41,02

Sumber : BPKKD Kabupaten Sleman (data diolah)

d. Persentase PAD + Bagi Hasil dengan Pengeluaran Rutin

Tabel 5.6
Perbandingan PAD dan Bagi Hasil dengan Pengeluaran Rutin
T.A 1997/1998 sd 2002

Tahun Anggaran (a)	PAD (b)	Bagi Hasil (c)	Total PAD + Bagi Hasil (d = b + c)	Pengeluaran Rutin (e)	% (f =d/e)
1997/1998	14.825.140.000,00	7.484.278.727,66	22.309.418.727,66	57.160.378.983,22	39,03
1998/1999	14.414.507.991,00	6.077.353.615,00	20.491.861.606,00	71.262.178.684,47	28,76
1999/2000	14.293.975.695,51	6.479.937.520,00	20.773.913.215,51	100.771.152.215,50	20,61
2000	15.301.765.951,00	6.356.167.333,00	21.657.933.284,00	92.088.674.071,50	23,52
2001	24.414.489.693,36	10.858.012.800,00	35.272.502.493,36	204.623.284.493,36	17,24
2002	34.001.261.931,95	21.184.390.109,00	55.185.652.040,95	82.889.470.337,78	66,58

Sumber: BPKKD Kabupaten Sleman (data diolah)

Selain mengukur kemampuan keuangan dengan menggunakan parameter-parameter di atas, maka perlu juga diketahui tingkat ketergantungan pemerintah Kabupaten Sleman terhadap Pemerintah Pusat. Untuk mengukur tingkat ketergantungan ini, digunakan rumus berikut:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Sumbangan dan Bantuan}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\% \\
 \text{Tahun Anggaran 1997/1998} &= \frac{62.200.930.560,00}{85.569.920.023,22} \times 100\% \\
 &= 72,70\% \text{ (dibulatkan)} \\
 \text{Tahun Anggaran 1998/1999} &= \frac{\text{Sumbangan dan Bantuan}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\% \\
 &= \frac{78.985.528.670,00}{99.956.556.169,47} \times 100\% \\
 &= 79,02\% \text{ (dibulatkan)} \\
 \text{Tahun Anggaran 1999/2000} &= \frac{\text{Sumbangan dan Bantuan}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\% \\
 &= \frac{103.993.390.000,00}{124.767.303.215,51} \times 100\% \\
 &= 83,35\% \text{ (dibulatkan)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Tahun Anggaran 2000} &= \frac{\text{Sumbangan dan Bantuan}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\% \\
 &= \frac{96.964.766.037,50}{118.622.699.321,50} \times 100\% \\
 &= \mathbf{81,74\% \text{ (dibulatkan)}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Tahun Anggaran 2001} &= \frac{\text{Sumbangan dan Bantuan}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\% \\
 &= \frac{205.430.000.000,00}{245.452.502.493,36} \times 100\% \\
 &= \mathbf{83,69\% \text{ (dibulatkan)}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Tahun Anggaran 2002} &= \frac{\text{Sumbangan dan Bantuan}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\% \\
 &= \frac{255.350.000.000,00}{327.995.652.040,95} \times 100\% \\
 &= \mathbf{77,85\% \text{ (dibulatkan)}}
 \end{aligned}$$

B. Pembahasan

1. Perkembangan PAD tahun 1997/1998 – 2002

Tabel 5.7

Realisasi dan Perkembangan Pendapatan Asli Daerah dengan Angka Indeks
T.A 1997/1998 sd 2002
(dalam rupiah)

Tahun Anggaran	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah	
	Realisasi	Kenaikan/Penurunan (%)
1997/1998	14.825.140.000,00	100
1998/1999	14.414.507.991,00	97
1999/2000	14.293.975.695,51	96
2000	15.301.765.951,00	103
2001	24.414.489.693,36	165
2002	34.001.261.931,95	229

Dari tabel 5.7, dapat diketahui bahwa hampir setiap tahunnya PAD mengalami kenaikan, kecuali pada tahun anggaran 1998/1999 PAD mengalami penurunan 3% atau sebesar 410.632.009 rupiah. Hal yang sama terjadi pada tahun anggaran 1999/2000, dimana PAD mengalami penurunan 1% atau sebesar 120.532.295,49 rupiah dari tahun sebelumnya. Sehingga perkembangan PAD selama tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 2002, berkisar antara - 4% sampai dengan + 129%.

- a. Pada tahun 1997/1998, PAD sebesar 100% karena tahun ini merupakan tahun dasar dalam perhitungan perkembangan PAD.

- b. Pada tahun 1998/1999, perkembangan PAD mengalami penurunan sebesar 3% dari tahun sebelumnya yaitu dari 100% menjadi 97%. Pada tahun anggaran ini PAD mengalami penurunan dikarenakan pada tahun ini penerimaan yang berasal dari retribusi daerah, penerimaan dinas-dinas dan penerimaan lain-lain turun.
- c. Pada tahun 1999/2000, PAD mengalami penurunan sebesar 1% yaitu dari 97% pada tahun 1998/1999 turun menjadi 96% pada tahun 1999/2000. Pada tahun anggaran ini PAD mengalami penurunan dikarenakan adanya pergantian Undang-Undang otonomi daerah yang baru sehingga mempengaruhi bagian pendapatan daerah karena penerimaan dari dinas-dinas pada bagian Pendapatan Asli Daerah dihapus atau ditiadakan.
- d. Pada tahun 2000, PAD mengalami kenaikan sebesar 7%. Kenaikan ini sangat besar karena sebenarnya pada tahun ini terjadi perubahan periode tahun anggaran dimana PAD hanya dihitung selama 9 bulan.
- e. Pada tahun 2001, PAD mengalami kenaikan sebesar 62% dari 103% pada tahun 2000 menjadi 165% pada tahun 2001. Pada tahun ini semua bagian penerimaan PAD mengalami kenaikan.
- f. Pada tahun 2002, PAD mengalami kenaikan sebesar 64% dari 165% pada tahun 2001 naik menjadi 229% pada tahun 2002. Pada tahun ini semua bagian penerimaan PAD mengalami kenaikan.

2. Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sleman

Tabel 5.8

Tingkat Kemampuan Kaeuangan Daerah Kabupaten Sleman
T.A 1997/1998 sd 2002
(dalam %)

Tahun Anggaran	PAD/TPD	PAD+BH/TPD	PAD/PR	PAD+BH/PR	SB/TPD
1997/1998	17,32	26,07	25,94	39,03	72,70
1998/1999	14,42	20,50	20,23	28,76	79,02
1999/2000	11,46	16,65	14,18	20,61	83,35
2000	12,90	18,26	16,62	23,52	81,74
2001	9,95	14,37	11,93	17,24	83,69
2002	10,37	16,82	41,02	66,58	77,85

a. Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah

Sebelum menganalisis kemampuan pendapatan asli daerah, perlu diketahui terlebih dahulu besarnya komponen pendapatan asli daerah. Perolehan sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman pada periode tahun anggaran 1997/1998 dan 1998/1999 terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dinas dan penerimaan lain-lain. Sedangkan pada periode tahun anggaran 1999/2000 sampai tahun anggaran 2002 hanya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD dan penerimaan lain-lain.

Sumber pendapatan asli daerah yang terbesar berasal dari pajak daerah. Di samping pajak, retribusi daerah juga termasuk pendapatan

terbesar setelah pajak sehingga selain pajak dan retribusi, penerimaan dari laba BUMD dan penerimaan lain-lain perlu dikembangkan juga agar dapat menunjang pendapatan asli daerah dalam membiayai pengeluaran daerah.

Untuk menggali dan meningkatkan potensi PAD, upaya pemerintah daerah setempat harus selalu dilaksanakan. Walaupun dari jumlah PAD setiap tahunnya mengalami kenaikan, akan tetapi terlihat bahwa PAD yang ada hanya bertumpu pada komponen yang paling dominan, yaitu pajak dan retribusi sehingga nampak bahwa tingkat perkembangan PAD terhadap Total Pendapatan Daerah mengalami penurunan (lihat tabel 5.8). Kecuali untuk tahun anggaran 2000 kemampuan PAD mengalami kenaikan sebesar 1,44% dari tahun sebelumnya yaitu dari 11,46% menjadi 12,90% dan untuk tahun anggaran 2002 naik sebesar 0,42%. Hal ini memperlihatkan bahwa pemerintah Kabupaten Sleman belum dapat mengoptimalkan PAD untuk pemasukan penerimaan daerah. Kemampuan PAD dalam tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 2002 hanya berkisar antara 9,95% – 17,32%. Sehingga dari tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan 2002, pola hubungan dan tingkat kemampuan keuangan daerah adalah instruktif, karena berada dibawah 25%, yang berarti kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sleman dilihat dari sisi PAD terhadap TPD sangat rendah sekali sehingga belum mampu melaksanakan otonomi daerah karena masih sangat tergantung dengan pemerintah pusat. Dan apabila pemerintah daerah melaksanakan otonomi daerah maka harus benar-benar secara aktif



meningkatkan potensi PAD yang ada agar dapat membiayai pengeluaran daerah.

b. Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil terhadap Total Penerimaan Daerah

Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan daerah, pemerintah Kabupaten Sleman tetap berupaya untuk meningkatkan kegiatan pemungutan PAD dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi pada tabel 5.8 nampak bahwa penerimaan daerah yang berasal dari PAD saja tidak cukup untuk memenuhi standar minimal PAD terhadap TPD untuk melaksanakan otonomi daerah. Karena itu, Bagi Hasil ditambahkan dengan PAD yang kiranya dapat membantu meningkatkan pendapatan. Sehingga dalam tabel 5.8 diatas dapat dilihat bahwa pada tahun anggaran 1997/1998, pola hubungan dan tingkat kemampuan keuangan daerah dilihat dari PAD ditambah Bagi Hasil terhadap TPD yaitu Konsultatif, karena kemandiriannya sebesar 26,07%. Sedangkan untuk tahun anggaran 1998/1999 sampai dengan 2002, pola hubungan dan tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sleman yaitu instruktif, yakni hanya berkisar antara 14,37% - 20,50% yang berarti masih belum mampu melaksanakan otonomi daerah.

c. Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengeluaran Rutin

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah untuk mencukupi pengeluaran rutin daerah. Pendapatan Asli

Daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Untuk dapat melaksanakan otonomi daerah, PAD Kabupaten Sleman harus mampu membiayai seluruh pengeluaran rutin daerah. Pada tabel 5.8, Kabupaten Sleman memiliki rata-rata PAD terhadap Pengeluaran Rutin sebesar 21,65% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Sleman belum mampu membiayai sebagian besar pengeluaran rutin daerahnya.

d. Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil terhadap Pengeluaran Rutin.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin. Namun pada tabel 5.8 terlihat bahwa PAD sendiri tidak cukup untuk digunakan sebagai pembiayaan terhadap pengeluaran rutin daerah Kabupaten Sleman. Dan walaupun PAD ditambah dengan Bagi Hasil, hanya mencapai rata-rata sebesar 32,62% per tahun.

Untuk melihat tingkat ketergantungan pemerintah Kabupaten Sleman terhadap pemerintah pusat, dari perhitungan di atas, nampak bahwa sumbangan dan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat kepada pemerintah Kabupaten Sleman hampir setiap tahunnya mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2000 sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat mengalami penurunan sebesar 1,61% dan pada tahun 2002 turun sebesar 5,84% dari tahun sebelumnya. Besarnya penurunan sumbangan dan bantuan ini berarti dapat mengurangi tingkat ketergantungan pemerintah Kabupaten Sleman terhadap pemerintah pusat karena semakin besar sumbangan dan bantuan maka pemerintah daerah akan semakin tergantung pada pemerintah pusat. Dalam periode penelitian ini, sumbangan dan bantuan mengalami 3 kali pergantian nama. Pada tahun anggaran 1997/1998 sampai 1998/1999 namanya sumbangan dan bantuan, pada tahun anggaran 1999/2000 sampai 2000 namanya subsidi daerah otonom dan bantuan pembangunan, dan pada tahun anggaran 2001 sampai 2002 namanya dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang sudah dikemukakan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman pada tahun anggaran 1998/1999 mengalami penurunan sebesar 3% dari tahun anggaran 1997/1998 yang merupakan tahun dasar dalam perhitungan perkembangan PAD. Hal yang sama terjadi pada tahun anggaran 1999/2000 dimana PAD mengalami penurunan sebesar 4% dari tahun anggaran 1997/1998, sedangkan tahun anggaran 2000 mengalami peningkatan sebesar 3% dari tahun anggaran 1997/1998 dan pada tahun anggaran 2001 dan 2002 PAD mengalami peningkatan masing-masing sebesar 65% dan 129% dari tahun anggaran 1997/1998. Perkembangan PAD Kabupaten Sleman yang mengalami kenaikan dari tahun anggaran 2000 sampai dengan tahun anggaran 2002 ini diharapkan mampu untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten Sleman dengan meminimalkan pengeluaran atau belanja daerah.
2. Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sleman belum cukup kuat untuk mendukung otonomi daerah. Hal ini disebabkan karena kecilnya Pendapatan Asli Daerah jika dibandingkan dengan belanja daerah yang sangat besar sehingga nampak bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman

dalam hal ini masih sangat tergantung pada pemerintah pusat yaitu rata-rata sebesar 79,73% per tahun dan juga bisa dilihat dari analisis kemampuan keuangan daerah yang digunakan, yaitu dengan cara membandingkan parameter yang ada yakni membandingkan persentase PAD terhadap total penerimaan daerah, persentase PAD ditambah bagi hasil terhadap total penerimaan daerah, persentase PAD terhadap pengeluaran rutin dan persentase PAD ditambah bagi hasil terhadap pengeluaran rutin diketahui bahwa Kabupaten Sleman belum mampu untuk melaksanakan otonomi daerah karena hasil dari perhitungan ini diketahui bahwa rata-rata PAD terhadap Total Penerimaan Daerah masih di bawah 25% yaitu sebesar 12,74% per tahun sehingga pola hubungan dan tingkat kemampuan keuangan daerah adalah instruktif yang berarti kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sleman belum mampu melaksanakan otonomi daerah. Begitu juga dengan rata-rata PAD terhadap Pengeluaran Rutin yang hanya sebesar 21,65% per tahun sehingga PAD dalam hal ini belum mampu untuk membiayai pengeluaran rutin daerah Kabupaten Sleman.

B. Keterbatasan Penelitian

Tidak adanya ukuran yang pasti mengenai batasan masing-masing parameter untuk mengukur kemampuan keuangan apakah mampu atau tidak daerah itu untuk otonomi, sehingga penulis hanya dapat menarik kesimpulan berdasarkan pendapat beberapa ahli mengenai batas maksimal dan minimal

masing-masing parameter untuk mengukur tingkat kemampuan keuangan daerah. Ukuran mengenai batasan parameter yang dimaksud yaitu,:

Persentase PAD terhadap Total Penerimaan Daerah

Persentase PAD + Bagi Hasil terhadap Total Penerimaan Daerah

Persentase PAD terhadap Pengeluaran rutin

Persentase PAD + Bagi Hasil terhadap Pengeluaran rutin

C. Saran

1. Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Bagian Laba BUMD Kabupaten Sleman sebaiknya ditingkatkan, misalnya pada PDAM dengan cara meningkatkan pelayanan, mendata kembali pelanggan PDAM, dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat agar lebih disiplin dalam membayar tagihan.
2. Pemerintah Kabupaten Sleman sebaiknya meminimalkan pengeluaran rutin daerah dengan cara melakukan penghematan pada bagian belanja daerah khususnya pada belanja barang, yaitu dengan menekan jumlah harga yang ada dalam anggaran dengan standar harga barang yang ada di pasar.
3. Pemerintah pusat sebaiknya mengeluarkan ketetapan tentang ukuran mengenai batasan dari masing-masing parameter untuk mengukur kemampuan keuangan daerah apakah mampu atau tidak daerah itu untuk berotonomi.

4. Bagi yang berminat untuk melakukan penelitian tentang kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, sebaiknya tidak hanya meneliti bagian kemampuan keuangan daerah saja, tetapi sebaiknya meneliti juga tentang kemampuan aparatut, kemampuan partisipasi masyarakat, kemampuan ekonomi, kemampuan demografi, dan kemampuan organisasi dan administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Adirinekso, Gidion. 1999. *Kerangka Teori Perencanaan Otonomi Daerah di Indonesia Masa Depan*. Jakarta: Jurnal Bisnis dan Ekonomi No 4.

Badan Pusat Statistik. 2002. *Kabupaten Sleman Dalam Angka*.

Boedijoewono, Noegroho Drs. 1999. *Pengantar Statistik Ekonomi dan Perusahaan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. 2002. *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002*. Jakarta: Direktorat Pengelolaan Keuangan Daerah dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

Dhyana, Made Wahyu. 2002. *Kemampuan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kotamadya Salatiga*. Skripsi S1. Yogyakarta: UPN "Veteran".

Halim, Abdul. 2001. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Pemerintah Republik Indonesia. 2002. *Undang-Undang Otonomi Daerah 1999*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Pemerintah Republik Indonesia. 2000. *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo.

Sribejani, Maria Magdalena. 2001. *Peranan Pendapatan Asli Daerah Terhadap APBD Tahun 1996-2000 di Kabupaten Sleman*. Skripsi S1. Yogyakarta: USD.

Supriatna, Tjahya. 1998. *Sistem Administrasi Pemerintah Daerah untuk Alokasi Subsidi*. Jakarta: Prisma No 8, LP3ES.

Syafrudin, Ateng. 1985. *Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II*. Muda Maju Bandung.

Widjaja, H.A.W. - 1998. *Percontohan Otonomi Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.

- 2001. *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.

L a m p i r a n



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Alamat : Jl Parasamya No. 1 Sleman Yogyakarta
Telp. (0274) 868800 Fax. (0274) 869533

SURAT KETERANGAN/IJIN

Nomor : 07.0 / X / 1445 / 2003.

Menunjuk Surat dari Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi Univ. Sanata Dharma Yogyakarta
Nomor : 662/PD I/FE/X/03 Tanggal: 20 Oktober 2003 Hal : Ijin Penelitian
Dengan ini kami tidak keberatan untuk :

1. Memberikan Persetujuan kepada :

N a m a : DEBBY MARIA LONGDONG
NIM : 992114179
Tingkat : S1
Akademi/ Universitas : USD Yogyakarta
Alamat Rumah/Kampus : Mrican Tromol Pos 29 Yogyakarta

2. Keperluan : Mengadakan penelitian dengan judul :

DELAKSANAAN

"ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENGHADAPI
OTONOMI DAERAH (Studi kasus pada Pemerintah Daerah Tingkat II Sleman)"

3. Lokasi : Kabupaten Sleman

4. Waktu : Mulai tanggal dikeluarkan s/d 23 Januari 2004

Dengan Ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah Setempat (Camat/Lurah Desa) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Bupati Sleman (c/q Bappeda Kab.Sleman).
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
5. Surat Izin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian diharap Pejabat Pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Kepada Yth.
Sdr. DEBBY MARIA LONGDONG

Dikeluarkan di : Sleman
Pada Tanggal : 23-10- 2003

Tembusan dikirim kepada Yth. :

1. Ka.Din.Ketentraman & Ketertiban Kab. Sleman
2. Ka. Bappeda Kab. Sleman
3. Ka. BPKKD kab. Sleman
4. Ka. Kant. BPS kab. Sleman
5. Ka. Dinas Perekonomian kab. Sleman
6. Peringgal.

a.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman
Ka. Bidang Litbang dan Evaluasi
Ub. Ka. Subid Data & Informasi

Nugroho, BA
NIP. 490 017 878



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman. Telp. (0274) 868414

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/735

Dengan ini Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman menerangkan bahwa :

Nama : Debby Maria Longdong
No. Mahasiswa : 992114179
Universitas : Sanata Dharma Yogyakarta.
Alamat Rumah : Mrican Tromol Pos 29 Yogyakarta.

telah mengadakan penelitian dengan judul " ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAMPELAKSANAANOTONOMI DAERAH " di Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman dari tanggal : 23 Oktober 200 3 sampai dengan 23 Januari 2004.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 15 Juni 2004

a.n. Kepala BPKKD

Kepala Sub. Bidang Anggaran



Dra. Hj. Peni Winarningsih, M.Si.

NIP 490030201.

Lampiran 1

DATA PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 1997/1998 dan 1998/1999

NO.	URAIAN	TAHUN ANGGARAN	
		1997/1998	1998/1999
I	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN TAHUN YANG LALU	762,212,735.56	472,277,552.47
I	POS SISA LEBIH PERHITUNGAN TAHUN YANG LALU	762,212,735.56	472,277,552.47
II	<u>BAGIAN PADS :</u>	14,825,140,000.00	14,414,507,991.00
1	Pajak Daerah	7,124,600,000.00	7,667,861,469.50
2	Retribusi Daerah	3,843,690,000.00	3,407,050,940.00
3	Bagian Laba BUMD	673,000,000.00	880,999,000.00
4	Penerimaan Dinas - Dinas	2,577,850,000.00	2,036,323,581.50
5	Penerimaan Lain - lain	606,000,000.00	422,273,000.00
III	<u>HASIL PAJAK / BUKAN PAJAK</u>	7,484,278,727.66	6,077,353,615.00
1	Bagi Hasil Pajak	7,222,876,511.66	5,853,489,195.00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak	261,402,216.00	223,864,420.00
IV	<u>SUMBANGAN DAN BANTUAN</u>	62,200,930,560.00	78,985,528,670.00
1	Sumbangan	46,320,833,100.00	59,233,359,100.00
2	Bantuan	15,880,097,460.00	19,752,169,570.00
V	<u>PENERIMAAN PEMBANGUNAN</u>	297,358,000.00	6,888,341.00
1	Pinjaman Pemda	297,358,000.00	6,888,341.00
2	Pinjaman BUMD	-	-
J U M L A H		85,569,920,023.22	99,956,556,169.47

Lampiran 2

DATA PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 1999/2000 dan 2000

NO	URAIAN		
		1999/2000	2000
I	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN TAHUN YANG LALU	0.00	0.00
II	BAGIAN PADS :	14,293,975,695.51	15,301,765,951.00
1	Pajak Daerah	7,439,300,000.00	7,279,301,908.00
2	Retribusi Daerah	5,201,501,800.00	5,426,980,300.00
3	Bagian Laba Usaha Daerah	873,122,161.51	1,262,000,000.00
4	Lain - lain Pendapatan	780,051,734.00	1,333,483,743.00
III	PENDAPATAN YG BERASAL DARI PEMBERIAN PEMERINTAH DAN ATAU INSTANSI YG LEBIH TINGGI	110,473,327,520.00	103,320,933,370.50
1	Bagi Hasil Pajak	6,229,017,380.00	6,255,165,403.00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak	250,920,140.00	101,001,930.00
3	Subsidi Daerah Otonom	87,385,439,000.00	76,523,790,787.50
4	Bantuan Pembangunan	16,607,951,000.00	20,440,975,250.00
5	Penerimaan Lain-lain	0.00	0.00
IV	BAGIAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH	0.00	0.00
1	Pinjaman dari Pemerintah Pusat	0.00	0.00
2	Pinjaman dari Lembaga Keuangan Dlm Negeri	0.00	0.00
J U M L A H		124,767,303,215.51	118,622,699,321.50

DATA PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 2001

NO	URAIAN	JUMLAH
I	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN TAHUN YANG LALU	0.00
II	BAGIAN PADS :	24,414,489,693.36
1	Pajak Daerah	12,964,540,068.36
2	Retribusi Daerah	7,364,446,500.00
3	Bagian Laba Badan Usaha Daerah	1,262,000,000.00
4	Lain - lain Pendapatan	2,823,503,125.00
III	BAGIAN DANA PERIMBANGAN	216,288,012,800.00
1	Bagi Hasil Pajak	10,858,012,800.00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak	0.00
3	Dana Alokasi Umum	205,430,000,000.00
4	Dana Alokasi Khusus	0.00
5	Pos Dana Darurat	0.00
IV	BAGIAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH	0.00
1	Pinjaman dari Pemerintah Pusat	0.00
2	Pinjaman dari Lembaga Keuangan Dlm Negeri	0.00
V	BAGIAN LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH	4,750,000,000.00
1	Penerimaan Dari Propinsi	4,750,000,000.00
2	Penerimaan Dari Kab./Kota Lain	0.00
J U M L A H		245,452,502,493.36

DATA PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 2002

NO	URAIAN	JUMLAH
I	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN TAHUN YANG LALU	0.00
II	BAGIAN PADS :	34,001,261,931.95
1	Pajak Daerah	17,074,636,138.95
2	Retribusi Daerah	9,443,952,700.00
3	Bagian Laba Badan Usaha Daerah	1,761,360,635.00
4	Lain - lain Pendapatan	5,721,312,458.00
III	BAGIAN DANA PERIMBANGAN	288,434,390,109.00
1	Bagi Hasil Pajak	20,500,000,000.00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak	684,390,109.00
3	Dana Alokasi Umum	255,350,000,000.00
4	Dana Alokasi Khusus	0.00
5	Pos Dana Darurat	0.00
6	Dana Perimbangan dari Propinsi	11,900,000,000.00
IV	BAGIAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH	0.00
1	Pinjaman dari Pemerintah Pusat	0.00
2	Pinjaman dari Lembaga Keuangan Dlm Negeri	0.00
V	BAGIAN LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH	5,560,000,000.00
1	Dana Pen eimbang	5,060,000,000.00
2	Dana Luncuran	500,000,000.00
J U M L A H		327,995,652,040.95



Kepala BPKKD
Kabupaten Sleman

[Signature]
Dra. Nogati Sri Karyati, MS
NIP. 380 004 061

Lampiran 5

DATA BELANJA RUTIN TAHUN ANGGARAN 1997/1998 SD 1998/1999

NO.	URAIAN	TAHUN ANGGARAN	
		1997/1998	1998/1999
1	Urusan Umum Pemerintah	12,067,833,099.67	13,849,399,877.00
2	Pekerjaan Umum	3,037,059,226.00	3,401,253,604.00
3	Lalu Lintas Angkutan Jalan	214,429,076.00	274,549,744.00
4	Kesehatan Umum	4,975,507,365.00	6,343,032,848.00
5	Bagian P dan K	32,222,264,858.00	41,402,013,020.00
6	Bagian Sosial, Depnaker, Transmigrasi dan PPH	737,125,564.00	861,773,820.00
7	Pertanian, Perhutanan, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Koperasi dan PPK	1,978,528,822.00	2,606,148,960.00
8	Perindustrian, Pertambangan dan Perdagangan	504,038,350.00	640,428,634.00
9	Usaha Daerah	-	-
10	Angsuran Hutang	234,717,000.00	124,167,945.00
11	Pensiun / Onderstand	-	-
12	Ganjaran	779,656,194.00	1,097,854,253.47
13	Lain - Lain	380,151,500.00	584,471,500.00
14	Tak Tersangka	29,067,928.55	77,084,479.00
J U M L A H		57,160,378,983.22	71,262,178,684.47

Lampiran 6

DATA BELANJA RUTIN TAHUN ANGGARAN 1999/2000 SD 2001

Uraian	Tahun Anggaran		
	1999/2000	2000	2001
A. Rutin			
Belanja Pegawai	84,407,918,000.00	74,564,920,537.50	165,581,938,136.00
Belanja Barang	9,520,219,832.00	10,960,636,134.00	21,128,584,067.00
Belanja Pemeliharaan	858,228,900.00	901,759,500.00	1,630,522,000.00
Belanja Perjalanan Dinas	161,825,000.00	147,750,000.00	267,315,000.00
Belanja Lain-lain	3,692,448,499.99	3,734,603,447.00	12,117,856,298.47
Angsuran Pinjaman/Hutang dan Bunga	261,049,048.42	187,517,719.10	363,413,688.12
Ganjaran, Subsidi/Sumbangan kpd Daer. Bawahan	849,302,490.00	973,022,430.00	1,676,581,930.00
Pengeluaran yg tidak termasuk bagian yg lain	919,901,500.00	342,117,500.00	1,592,311,350.00
Pengeluaran Tak Tersangka	100,258,945.09	276,346,803.90	264,762,023.77
JUMLAH	100,771,152,215.50	92,088,674,071.50	204,623,284,493.36

DATA BELANJA RUTIN TAHUN ANGGARAN 2002

NO.	URAIAN	JUMLAH
<u>A. ADMINISTRASI UMUM</u>		
1	Belanja Pegawai	73,351,647,020.81
2	Belanja Barang	7,228,237,116.97
3	Belanja Pemeliharaan	1,930,397,200.00
4	Belanja Perjalanan Dinas	379,189,000.00
JUMLAH		82,889,470,337.78



**Kepala BPKKD
Kabupaten Sleman**

(Handwritten Signature)
**Dra. Nogati Sri Karyati, MS
NIP. 380 004 061**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

KETERANGAN PRIBADI

Nama Lengkap : Debby Maria Longdong
Nama Panggilan : Debby / Eby
Tempat / Tanggal Lahir : Lembean, 17 – Desember – 1981, Sulawesi Utara
Alamat : Kelurahan Paslaten II Lingkungan VI, no.293
Tomohon – MANADO
No.Handphone : 08157910417
Alamat Email : debbymaria@hotmail.com

KETERANGAN PENDIDIKAN

Tahun 1987 – 1993 : SD ‘Stella Maris’ Girian, Sulawesi Utara
Tahun 1993 – 1996 : SLTP Negeri I Bitung, Sulawesi Utara
Tahun 1996 – 1999 : SMU ‘Karitas’ Tomohon, Sulawesi Utara
Tahun 1999 – 2004 : Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta



Hormat saya,

Debby Maria Longdong